

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU SELAMA TAHUN 2016**

**TESIS**

**OLEH :**

**SALYA PURWAGANDA**

**NPM : 201320252016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Selama Tahun 2016  
Nama Mahasiswa : Salya Purwaganda  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201320252016  
Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Januari 2018

Jakarta, 13 Januari 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Pengaji : Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH  
NIDN: 0311026802

Pengaji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM  
NIDN: 0323015604

Pengaji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH  
NIDN: 0323035802

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Dwi Atmoko, SH., MH  
NIDN: 0316077604

Direktur Pascasarjana

Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM  
NIDN: 0311116501

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Selama Tahun 2016  
Nama Mahasiswa : Salya Purwaganda  
Nomor Pokok Mahasiswa: 201320252016  
Program Studi/Program : Magister Hukum/Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Pidana



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

**“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Selama Tahun 2016”.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 13 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Salya Purwaganda  
NPM: 201320252016

## **ABSTRAK**

**Salya Purwaganda, 201320252016, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Selama Tahun 2016, Jumlah Halaman 196, 2018.**

**Kata Kunci :** Pembakaran Hutan Dan Lahan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggangan Kebakaran.

Kekayaan alam yang harus dikelola, diperuntukkan untuk kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, hal inipun diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah Daerah wajib mengelola kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu antara lain, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau selama tahun 2016 ?; 2) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah yang seharusnya dalam menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas ?.

Metode penelitian: spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan tentang suatu hal yang sedang terjadi pada tempat tertentu, metode pendekatannya adalah yuridis normatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengolah data sekunder, yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder, tersier.

Kesimpulannya : 1) Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan beberapa peraturan di daerah-daerah sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun penegakan dilapangan masih sangat lemah lantaran Pemerintah belum mengeluarkan suatu kebijakan atau regulasi khusus yang mengatur dampak dari pembakaran hutan dan lahan; 2) Ketegasan Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan haruslah memikirkan kelestarian hutan. Pemerintah dan para penegak hukum harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk pelaku pembalakan liar dan oknum yang berada dibalik para pelaku pembalakan liar itu. Penerapan Hukum harus sama dan tidak pandang bulu, walaupun seorang pejabat daerah yang melakukan perbuatan pidana tersebut, harus tetap dihukum seberat-beratnya.

**Pembimbing :**                   **DR. H. Boy Nurdin, SH., MH.**  
   **DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.**

## **ABSTRACT**

**Salya Purwaganda, 201320252016**, Criminal Law Enforcement Against Forest and Land Burning Perpetrators In Riau Province During 2016, Total Page 190, 2018.

**Keywords:** Forest and Land Burning, Law Enforcement Against Arsonists, Government Policy In Fire Enforcement.

The natural wealth that must be managed, for the welfare, the prosperity of the entire Indonesian people without exception, it is also mandated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which states "the earth and the air and the wealth contained therein are controlled by the state and used for stock-prosperity of the people ". The Regional Government is obliged to provide for the prosperity of all Indonesian people. Therefore, among others, the Government has issued Law No.41 of 1999 on Forestry. Problem formulation: 1) How is law enforcement for forest and land actors in Riau Province during 2016 ?; 2) How are government policies that are addressing widespread forest and land impacts?

Research method: research specification is analytical descriptive, research describing about something happened at certain place, approach method is juridical normative, that is method used to process secondary data, consist of primary raw material, secondary, tertiary.

Conclusion: 1) Forest and land fires that already exist in several laws and regulations in article 56 paragraph (1) of Law Number. 39 of 2014 on Plantations, Article 69 of Law Number. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, Article 50 Paragraph (3) Sub-Paragraph d of Law Number 41 Year 1999 About Forestry and some regulations in areas often occur forest and land fires. But enforcement in the field is still very weak because the Government has not issued a specific regulation or regulation that takes the impact of forests and land; 2) Government's firmness in taking a policy full consideration of forest sustainability. Governments and law enforcement officials must provide it with strength and weight, including the perpetrators of illegal logging and the persons behind the perpetrators of illegal logging. The application of the Law should be the same and indiscriminate, although there are local officials who commit the criminal act, it must be weighed heavily.

**Advisor :**

**DR. H. Boy Nurdin, SH., MH.**

**DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.**

## KATA PENGANTAR

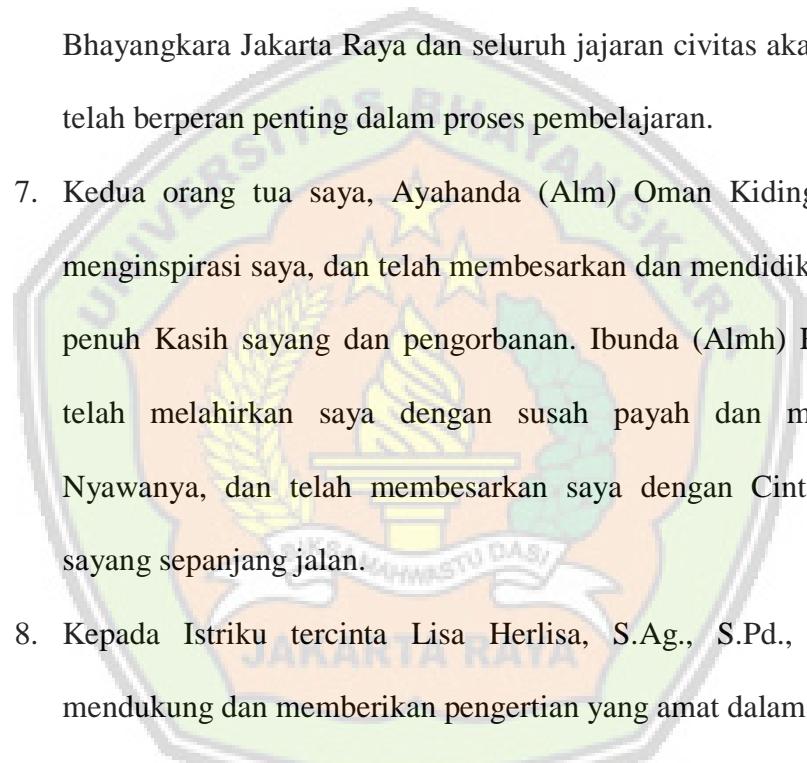
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Tesis ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program psaca sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Proposal Penelitian Tesis ini Peneliti memilih judul: “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Selama Tahun 2016*” Peneliti menyadari bahwa materi Proposal Penelitian Tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Tesis dengan sebaik-baiknya.

Penelitian Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak DR. Anton Wachidin Widjaja, S.E., M.M., selaku Direktur Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- 
3. Bapak Prof. I Made Widnyana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  4. Bapak DR. H. Boy Nurdin S.H., M.H. Selaku Pembimbing Satu Tesis.
  5. Bapak DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Dua Tesis.
  6. Dosen Fakultas Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh jajaran civitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
  7. Kedua orang tua saya, Ayahanda (Alm) Oman Kiding yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda (Almh) Romlah yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan.
  8. Kepada Istriku tercinta Lisa Herlisa, S.Ag., S.Pd., yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
  9. Kepada anakku tercinta Salman Ulwan Zulfan dan Ahmad Hikmawan Ramadhan yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.
  10. Kepada Adinda kader dari Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yaitu DR. (c). Adi Suryo Dewantoro, S.H., M.H., yang telah mendukung baik secara doa maupun moril demi

memotivasi saya agar dapat menggapai gelar Magister Hukum (M.H.) dengan predikat kelulusan yang baik.

11. Kepada seluruh Sahabat Terbaik saya yang selalu hadir di kala susah maupun senang, yang telah memotivasi saya dalam perkuliahan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik secara konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh

Bekasi, 01 Januari 2018

Salya Purwaganda

**MOTTO**

**“PERJUANGKANLAH HAK DENGAN KEBENARAN, KEJUJURAN DAN  
KEADILAN SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM”.**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Tesis	
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>ABSTRAK</b>	
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	16
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1.4. Kerangka Pemikiran.....	40
1.5. Metode Penelitian.....	41
1.6. Sistematika Penulisan.....	45
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Grand Teori, Middle Teori dan Applied Teori.....	46
2.1.1. Grand Teori.....	46
2.1.2. Middle Teori.....	47
2.1.3. Applied Teori.....	50
2.1.4. Tinjauan Umum Mengenai Hutan dan Hasil Hutan.....	56
2.1.5. Pengertian Hutan, Kehutanan, Asas dan Tujuan Kehutanan.....	56
2.1.6. Status, Fungsi, Dan Pengurusan Hutan .....	62
2.1.7. Pengelolaan Hutan.....	67
2.1.8. Perizinan Kehutanan Dan Perlindungan Hutan.....	83
2.1.9. Pemanfaatan Hutan.....	88
2.1.10. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.....	92

2.2. Instrumen Perizinan Tindak Pidana Kehutanan.....	109
2.3. Sumber Hukum Kehutanan Di Indonesia.....	119

### **BAB III**

#### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**

3.1. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	130
3.2. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	131
3.3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	131
3.4. Peraturan Daerah Mengenai Karhutla.....	133
3.5. Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Di Riau Terhadap 15 Perusahaan.....	135
3.6. Quo Vadis Paradigma Hukum Dalam Penegakannya Di Masyarakat.....	151

### **BAB IV**

#### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG SEMAKIN MELUAS**

4.1. Reformasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau.....	158
4.1.1. Pengelolaan Dan Zonasi Tata Guna Lahan untuk Mencegah Kebakaran Secara Efektif.....	162
4.1.2. Tebang Habis Untuk Dikonversi Pada Kegiatan Budidaya.....	164
4.1.3. Sistem Informasi Kekeringan Dan Kebakaran.....	164
4.1.4. Penguatan Kelembagaan Pengembangan Kapasitas Lokal.....	165
4.2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.....	171
4.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	177
4.4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	184

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.....	189
---	-----

## BAB V

### PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	194
5.2. Saran.....	195

DAFTAR PUSTAKA.....	iv
---------------------	----

